

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PADA LAPORAN KEUANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

Puji Afriyeni¹, Siti Zuliyana², Siska Asrina³, Syaherwandi⁴

¹²³⁴Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu, Indonesia

afriyenipuji056@gmail.com; sitizuliyana2004@gmail.com; siskaasrinaikha@gmail.com; syaherwandi1@gmail.com

Received: 10-06-2024

Revised: 20-06-2024

Approved: 28-06-2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan membahas tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Laporan Keuangan Bappeda Kabupaten Bengkulu. Standar Akuntansi Pemerintahan dirancang untuk menciptakan standar yang konsisten dalam penyajian informasi keuangan pemerintah. Dalam Konteks Pemerintahan, laporan keuangan juga berperan penting sebagai alat untuk menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan Jenis Penelitian Lapangan. Sumber data yang digunakan yaitu data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Bappeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laporan Keuangan yang disusun oleh Bappeda Kabupaten Bengkulu sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Namun, ada beberapa transaksi yang masih dilakukan dengan berbasis kas. Sebagai SKPD, Bappeda bertanggung jawab menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari 5 komponen laporan keuangan untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Laporan Keuangan, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

PENDAHULUAN

Tuntutan akan tata pemerintahan yang baik saat ini semakin meningkat. Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu ditingkatkan untuk menjamin pelaporan keuangan yang lebih baik. Dengan meningkatnya tuntutan tersebut, tujuan pemerintah saat ini adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Penerapan pengelolaan keuangan publik yang transparan dan bertanggung jawab mendorong pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan kinerja akuntan publik. Sistem akuntansi merupakan isu terpenting dalam reformasi saat ini menuju pengelolaan pemerintahan yang lebih baik.

Untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah harus disajikan secara akurat sesuai dengan prinsip yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Hal ini tertuang dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur tentang bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD. (Tumanduk, 2022)

Agar dapat menghasilkan keseragaman dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang SAP berbasis akrual pada tahun 2010, pemerintah diharapkan mampu menyediakan laporan keuangan yang andal sebagai dasar pengambilan keputusan dan pedoman, karena mempunyai dasar hukum. Standar tersebut akan diterapkan dalam lingkup pemerintahan sebagai pedoman yang harus diikuti oleh setiap kabupaten/kota dan daerah otonom dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan SAP yang berlaku.

Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan saat ini atau pada suatu waktu tertentu (Kasmir, 2019). Dalam Konteks Pemerintahan, laporan keuangan juga berperan penting sebagai alat untuk menjamin

akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan alokasi sumber daya.

Dalam penyusunan laporan keuangan harus memenuhi standar salah satunya yakni Standar Akuntansi Pemerintah. SAP pada laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bengkalis berperan penting dalam menyediakan informasi keuangan yang akurat, transparan, dan andal kepada pemangku kepentingan seperti pemerintah, masyarakat, atau lembaga keuangan. Penggunaan SAP dalam pelaporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis akan membantu dalam melakukan analisis keuangan dan mengambil keputusan pengelolaan keuangan publik dengan lebih baik.

Bappeda Kabupaten Bengkalis adalah sebuah instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi serta monitoring dan evaluasi dibidang perencanaan dan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis. Bappeda Kabupaten Bengkalis memiliki tugas dan fungsi yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pembangunan di daerah tersebut. Beberapa tugas dan fungsi dari Bappeda Kabupaten Bengkalis antara lain: (1) Merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bengkalis. (2) Melaksanakan bimbingan, koordinasi dan konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah. (3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. (4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bappeda Kabupaten Bengkalis telah menyusun laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Ternyata dalam penyusunan Laporan Keuangan oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis dan Standar Akuntansi Pemerintah terdapat beberapa komponen yang berbeda, berikut ini Komponen Laporan Keuangan yang disusun oleh Kantor Bappeda Kabupaten Bengkalis, terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Oprasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan, untuk komponen Laporan Keuangan menurut Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah terdiri dari tujuh komponen yaitu: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Oprasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dalam praktiknya, tidak semua pemerintah daerah menerapkan SAP dengan benar dan konsisten, sehingga dapat mengakibatkan penyajian informasi keuangan yang salah atau tidak akurat.

Penelitian dengan topik Standar Akuntansi Pemerintah telah banyak diteliti oleh peneliti terdahulu. Dalam penelitian menurut Septian Asriandi Putra dan Rara Juniar Varina menyebutkan bahwa implementasi SAP berbasis akrual dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bengkulu, khususnya oleh BPKAD sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Namun, masih perlu peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur pengelolaan anggaran pada setiap OPD Kota Bengkulu (Varina, 2021). Sedangkan menurut Maimunah menyebutkan pengimplementasian penerapan SAP berbasis akrual masih belum diterapkan secara keseluruhan atau 100%, hal ini juga dikarenakan faktor SDM yaitu, kurangnya sosialisasi dan juga pengetahuan para pegawai pemerintah daerah di Kota Palembang dalam penerapannya akuntansi secara (Henukh, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh paparan yang telah penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis”**.

Dari identifikasi masalah pada uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya adalah apakah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah pada penyusunan Laporan Keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak.

TINJAUAN LITERATUR

Teori *Good Governance*

Good governance diartikan sebagai mengelola tatanan atau urusan-urusan publik termasuk pengeolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk kepentingan pembangunan di masyarakat. Di dalam melaksanakan prinsip tersebut, pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip yang telah ada. Karena dengan pemerintahan yang baik dan benar akan menjadikan tata kelola yang terjaga dan sistematis. (Khoiriawati, 2022)

Teori *Good governance* sangat penting karena merupakan sebuah konsep yang menekankan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, antara lain transparansi dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas atau tanggung jawab yang jelas, tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, dan pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Salah satu upaya Bappeda Kabupaten Bengkalis untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah dengan laporan keuangan. Laporan ini disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan memenuhi prinsip tepat waktu serta disusun agar dapat dihasilkan laporan keuangan yang akurat dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan untuk menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, pemerintah juga mulai berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam proses pengawasan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) (Haeli, 2020).

Akuntansi Pemerintah

Akuntansi pemerintahan adalah suatu sistem akuntansi yang mengkhususkan diri pada pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi pada instansi pemerintah. Departemen Perbendaharaan Negara menyusun laporan akuntansi tentang aspek-aspek pengelolaan Perbendaharaan Negara. Selain itu, bidang ini mencakup pengendalian pengeluaran APBN, termasuk kepatuhan terhadap undang-undang yang berlaku. Tujuan pokok dari akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut (Prayogo, 2023):

1. Pertanggungjawaban, tujuan dari akuntansi pemerintah adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang lengkap, akurat dan tepat waktu yang berguna bagi mereka yang bertanggungjawab atas pengoperasian lembaga pemerintah.
2. Managerial, akuntansi pemerintah juga diperlukan untuk menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan evaluasi operasi pemerintah.
3. Pengawasan, akuntansi pemerintahan diadakan untuk memungkinkan diadakannya pengawasan pengurusan keuangan negara dengan lebih mudah oleh aparat pemeriksa. Negara Indonesia memiliki badan pemeriksa eksternal yaitu BPK-RI yang mengawasi pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang terdiri dari pemeriksaan keuangan umum (*general audit*), pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan operasional atau administrasi (*managemen audit*) dan pemeriksaan ketaatan (*complianceaudit*).

Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruil

Basis akrual sekarang ini telah menjadi basis yang umum digunakan oleh perusahaan-perusahaan, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil, baik yang telah *go public* maupun yang belum *go public*. Basis akrual ini dapat memberikan gambaran yang lebih baik mengenai kinerja perusahaan, sehingga perusahaan dapat membuat kebijakan yang lebih relevan untuk masa depan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tujuan penyusunan laporan keuangan dengan SAP adalah untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang lebih baik. SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), dilengkapi dengan Pengantar Standar Akuntarai Pemerintahan dan disusun mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Pedoman lainnya yang digunakan sebagai dasar penggunaan SAP bagi pemerintah pusat dan daerah adalah Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan Buletin Teknis SAP, yang seluruhnya diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) (Setiawan, 2021).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ini menjelaskan bahwa, “Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar”. Sedangkan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah dijelaskan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruil adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD (Trisnawati, 2020).

Basis Pencatatan Akuntansi Pemerintah

Basis akuntansi merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang menentukan kapan pengaruh atas transaksi atau kejadian harus diakui untuk tujuan pelaporan keuangan. Basis kas dan basis akrual adalah dua prinsip akuntansi umum yang biasa digunakan. Dasar akuntansi ini berkaitan dengan waktu dilakukannya pengukuran (Sitepu, 2024).

1. Basis Akuntansi Kas (*Cash Basis of Accounting*)

Dalam akuntansi kas, pendapatan hanya muncul ketika uang tunai diterima, dan pengeluaran hanya muncul ketika uang tunai dibayarkan. Dalam praktik akuntansi pemerintahan Indonesia, basis kas digunakan untuk menyajikan laporan realisasi anggaran yang berarti bahwa pendapatan diakui pada saat kas diterima oleh rekening kas umum negara/daerah, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara/daerah.

2. Basis Akuntansi Akruil (*Accrual Basis of Accounting*)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ini sudah diterapkan diseluruh Pemerintah Daerah yang ada di Indonesia. Sebelum PP 71 Tahun 2010 yang dikenal dengan accrual basis, pemerintah sudah terlebih dahulu menerapkan PP 24 Tahun 2008 yang dikenal dengan sistem akuntansi kas menuju akrual. Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual waktu pencatatan sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat (Satrio, 2016).

Secara teoritis, akuntansi berbasis akrual diharapkan dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan akuntansi berbasis kas. Akuntansi dan perhitungan yang tepat dari semua biaya yang dibayar dan tidak dibayar memungkinkan pengukuran akuntansi basis akrual yang lebih baik secara konseptual, pencatatan tepat waktu dan pemberitahuan kewajiban masa mendatang. Data yang berkaitan dengan kinerja dapat memberikan informasi tentang penggunaan uang yang sebenarnya. Dalam konteks transparansi dan akuntabilitas pemerintah saat ini, akuntansi yang baik merupakan salah satu alat yang diperlukan.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan (Hidayat, 2018). Laporan Keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi, dimana dalam proses tersebut semua transaksi yang terjadi akan dicatat, diklasifikasikan, diikhtisarkan untuk kemudian disusun menjadi suatu laporan keuangan. Di mana dalam laporan keuangan tersebut akan terlihat data kuantitatif dari harta, hutang, modal, pendapatan, dan biaya-biaya dari perusahaan bersangkutan.

Standar Akuntansi Keuangan, menyatakan bahwa ruang lingkup laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, seperti laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan, dan laporan serta bahan penjelasan lainnya (I. A. Indonesia, 2015). Menurut Luviani dan Pramiudi, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada saat ini atau dalam jangka waktu tertentu (Pramiudi, 2020). Sedangkan menurut Morgan dalam Andina, laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aset, kewajiban, modal, dan pendapatan yang dimiliki oleh suatu perusahaan, beban yang ditanggung oleh perusahaan, perubahan dalam aset, kewajiban, atau modal, dan kinerja manajemen perusahaan, dan memberikan catatan – catatan atas laporan keuangan perusahaan (Andina, 2021).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah dokumen tertulis yang memuat informasi keuangan tentang suatu entitas, antara lain posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, dan arus kas selama suatu periode waktu. Oleh karena itu, laporan keuangan merupakan bahan informasi bagi para penggunanya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Selain sebagai informasi, laporan keuangan juga merupakan akuntabilitas sekaligus menggambarkan indikator kesuksesan dalam mencapai tujuan.

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (Rahma, 2020).

1. Relevan

Laporan keuangan pemerintah bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya sesuai kebutuhan pengguna, sehingga dapat mempengaruhi keputusan pengguna, khususnya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi evaluasi masa lalu.

2. Andal

Informasi yang andal (dapat dipercaya) dalam laporan keuangan pemerintah berarti bahwa bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan

pemerintah mungkin saja relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan dan merugikan pengguna laporan keuangan.

3. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan akan memuat informasi yang lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik dari pada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan dapat dipahami jika pengguna mengerti dengan informasi-informasi yang disajikan dan mampu menginterpretasikannya. Hal ini dapat terlihat dari manfaat informasi yang disajikan tersebut terhadap pengambilan keputusan. Untuk itu, penyajian informasi dalam laporan keuangan pemerintah harus menggunakan format/bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut (Fitra, 2019):

1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Adapun unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahunan anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
 - b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahunan anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
 - c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) selama satu periode tahun anggaran. Laporan perubahan SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur- unsur yang terdapat dalam laporan perubahan SAL dan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.
3. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas.
4. Laporan Oprasional
Laporan oprasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan oprasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
 - b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.
 - c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - d. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasayang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.
5. Laporan Arus Kas
Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.
6. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan perubahan ekuitas atau disebut juga sebagai laporan perubahan modal merupakan bagian dari laporan keuangan pada siklus akuntansi, Laporan perubahan ekuitas (modal) berfungsi untuk mengetahui penggunaan modal pada pemerintah. Laporan perubahan ekuitas merupakan ikhtisar tentang perubahan modal yang terjadi selama jangka waktu tertentu, misalnya satu bulan atau satu tahun.
7. Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan negatif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Oprasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan

untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini membahas mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Pada Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode pendekatan Deskriptif Kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan, tulisan dan perilaku dari orang-orang yang dapat diamati. Jenis penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu jenis penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan bertujuan untuk menemukan masalah dan memecahkannya (Dono, 2021).

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diambil langsung tanpa perantara dari sumbernya yaitu melalui wawancara langsung dengan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu melalui buku-buku, jurnal ilmiah, dan internet website.

Teknik analisis data yang akan dilakukan oleh peneliti adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan model Milles dan Huberman. Aktivitas dalam analisa data antara lain sebagai berikut (Fiantika, 2022):

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data yaitu proses merangkum, memilih hal-hal yang pokok, mengklasifikasikan, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data pada tahapan selanjutnya.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa diuraikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya, yang paling sering digunakan untuk penyajian data kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami.

3. *Conclusion Drawing* (Verifikasi)

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pada Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkalis telah menyusun laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis yang dialokasikan Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis secara tepat waktu. Dalam Laporan Keuangan ini tersedia informasi yang relevan mengenai posisi keuangan maupun capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis. Penyampaian laporan keuangan ini merupakan salah satu upaya Bappeda Kabupaten Bengkalis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang memenuhi prinsip tepat waktu

dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan yang akurat dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan untuk menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan Hasil wawancara penulis dengan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan di peroleh informasi ada beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Bagian Keuangan dan Perlengkapan Bappeda Kabupaten Bengkalis dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut(Karunia, 2023):

1. Analisis transaksi
2. Penjurnalan transaksi
3. Posting buku besar
4. Penyusunan Neraca Saldo
5. Jurnal Penyesuaian
6. Penyusunan neraca saldo yang disesuaikan
7. Menyusun laporan keuangan
8. Menjurnal dan memposting ayat jurnal penutup
9. Menyusun neraca saldo setelah penutupan

Bagian Keuangan dan Perlengkapan Bappeda Kabupaten Bengkalis dalam pencatatan transaksi menggunakan penjurnalan atau melakukan posting atau pemindahan transaksi dari jurnal ke buku besar, yang dilakukan melalui aplikasi SAPD (Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah). Sesuai dengan Permendagri No. 64 Tahun 2013, pemerintah daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara integrasi. SAPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Aplikasi ini merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementrian dalam Negeri kepada Pemerintah Daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

SAPD menyajikan informasi keuangan dan non keuangan dari setiap daerah. Data keuangan yang utama terdiri dari APBD, Dana Perimbangan, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Perusahaan Daerah, dan data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Begitu pula unit usaha lain yang sistem pencatatannya sudah menggunakan aplikasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa suatu laporan keuangan harus lengkap dengan mencakup tujuh hal ini yaitu(R. Indonesia, 2010):

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Oprasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Hasil wawancara penulis dengan Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Bappeda Kabupaten Bengkalis dan dengan melihat dokumen laporan keuangan tahunan diperoleh informasi bahwa laporan keuangan yang disusun oleh Bagian Keuangan dan Perlengkapan Bappeda Kabupaten Bengkalis tidak menggunakan semua jenis laporan. Laporan keuangan yang ada yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Oprasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dari segi penyajian laporan keuangan tahunan yang di buat Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Bappeda Kabupaten Bengkalis, SAP berbasis akrual sudah diterapkan. Namun, ada beberapa transaksi yang masih dilakukan dengan berbasis kas, yaitu ketika ada penerimaan

dan pengeluaran kas untuk Laporan Realisasi Anggaran. Tapi disisi lain untuk Laporan operasional, Laporan perubahan ekuitas, dan neraca diterapkan dengan basis akrual dimana ketika adanya transaksi atau peristiwa diakui, dicatat, dan dilaporkan pada laporan keuangan ketika pengeluaran terjadi, dengan tidak melihat kas diterima ataupun dibayarkan.

Seperti dijelaskan bahwa laporan keuangan tahunan Bappeda Kabupaten Bengkalis telah menyajikan lima jenis laporan dikarenakan selaku SKPD, Bappeda merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang diberikan wewenang oleh kepala daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah, Bupati Bengkalis hanya mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kepala SKPD selaku pengguna anggaran. Sebagai pengguna anggaran, Bappeda bertanggung jawab menyampaikan laporan keuangan kepada BUD (Bendahara Umum Daerah) yang terdiri dari 5 komponen laporan keuangan, diantaranya yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selanjutnya, BUD akan merekap semua laporan keuangan dari setiap SKPD di Kabupaten Bengkalis dan menjadikannya laporan keuangan induk kabupaten bengkalis. Laporan induk tersebut terdiri dari 7 komponen laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih, Neraca, Laporan Oprasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Namun, dalam proses penyusunan laporan keuangan tentu terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan. Kendala tersebut adalah Aplikasi error, Ketika aplikasi mengalami error proses penyusunan laporan menjadi terhambat dan mempengaruhi keakuratan data yang dimasukkan. Kemudian jaringan internet, keterbatasan jaringan internet yang cepat dan stabil juga menjadi kendala dalam penyusunan laporan keuangan. Koneksi yang kurang baik dapat menghambat pengumpulan data dan informasi yang diperlukan. Serta dokumen kelengkapan seperti surat keputusan dari Bupati yang terlambat diterbitkan atau diturunkan.

KESIMPULAN

Penyusunan laporan keuangan harus memenuhi standar salah satunya yaitu Standar Akuntansi Pemerintah, standar ini merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan. Bappeda Kabupaten Bengkalis telah menyusun laporan keuangan tahunan sesuai dengan SAP berbasis akrual tapi belum sepenuhnya. Karena, ada beberapa transaksi yang masih dilakukan dengan berbasis kas, yaitu ketika ada penerimaan dan pengeluaran kas untuk Laporan Realisasi Anggaran. Tapi disisi lain untuk Laporan operasional, Laporan perubahan ekuitas, dan neraca diterapkan dengan basis akrual dimana ketika adanya transaksi atau peristiwa diakui, dicatat, dan dilaporkan pada laporan keuangan ketika pengeluaran terjadi, dengan tidak melihat kas diterima ataupun dibayarkan.

Selain itu, ternyata untuk Laporan Keuangan yang di susun oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis dan Standar Akuntansi Pemerintah terdapat beberapa komponen yang berbeda, berikut ini Komponen Laporan Keuangan yang disusun oleh Bappeda Kabupaten Bengkalis, terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Oprasional
3. Neraca
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

Sedangkan, untuk komponen Laporan Keuangan menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah terdiri dari beberapa komponen sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan perbedaan komponen laporan keuangan diatas, Laporan Keuangan yang disusun oleh Bappeda tidak sepenuhnya salah atau tidak sesuai dengan pedoman SAP berbasis akrual. Ada alasan dibalik perbedaan tersebut yaitu dikarenakan selaku SKPD, Bappeda merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis yang diberikan wewenang oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selaku pemegang kekuasaan pengelola keuangan daerah, Bupati Bengkalis hanya mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada kepala SKPD selaku pengguna anggaran. Sebagai pengguna anggaran, Bappeda bertanggung jawab menyampaikan laporan keuangan kepada BUD (Bendahara Umum Daerah) yang terdiri dari 5 komponen laporan keuangan, diantaranya yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selanjutnya, BUD akan merekap semua laporan keuangan dari setiap SKPD di Kabupaten Bengkalis dan menjadikannya laporan keuangan induk kabupaten bengkalis. Laporan induk tersebut terdiri dari 7 komponen laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam proses penyusunan laporan keuangan Bappeda terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi yaitu Aplikasi SAPD error, Jaringan internet yang tidak stabil atau koneksi buruk serta keterlambatan penyampaian dokumen-dokumen kelengkapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andina, F. (2021). Penyusunan Laporan Keuangan Sederhana Untuk Ukm (Kasus Pada Up Cool Consulting). *Jurnal Riset Akuntansi*, 13(01).
- Dono, B. E. (2021). *Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Siswa*. Guepedia.
- Fiantika, F. R. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Fitra, H. (2019). *Analisis Neraca Dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintahan Daerah*. CV IRDH.
- Haeli. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Bestari*, 01(01).
- Henukh, I. T. (2020). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Kupang. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 01(02).
- Hidayat, W. W. (2018). *Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Indonesia, I. A. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 Laporan Keuangan*. IAI.
- Indonesia, R. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah*. Sekretariat Negara.
- Karunia, L. (2023). *Akuntansi Pemerintahan: Konsep dan Praktik di Pemerintah Pusat dan Daerah*. Selemba Empat.

- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali Pers.
- Khoiriawati, S. T. A. Z. dan N. (2022). Penerapan Good Governance Pada Pemerintahan Kampung Empang Pandan Kecamatan Kto Gasib Kabupaten Siak. *Edunomika*, 06(02).
- Pramiudi, L. dan. (2020). Pengaruh Leverage, Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Keputusan Hedging. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 08(02).
- Prayogo, Y. (2023). Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis AkruaI dalam Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi (Dinamika)*, 03(02).
- Rahma, F. (2020). Analisis Karakteristik Kualitatif Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Dan Kaitannya Dengan Kualitas Laporan Keuangan Daerah Di Kota Baubau. *Jurnal Economix*, 08(01).
- Satrio, D. (2016). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI di Kabupaten Jombang. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 18(01).
- Setiawan, T. (2021). *Mahir Akuntansi Keuangan*. Bhuana Ilmu Populer.
- Sitepu, H. V. (2024). *Akuntansi Sektor Publik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Trisnawati, N. (2020). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (Sap) Berbasis AkruaI Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 05(02).
- Tumanduk, A. V. (2022). Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi*, 17(4).
- Varina, S. A. P. dan R. J. (2021). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 01(02).